

**TESIS**

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN, RASIO  
DESENTRALISASI FISKAL, RASIO BELANJA MODAL DAN RASIO  
BELANJA TRANSFER KE DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN  
PADA KABUPATEN TANAH BUMBU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sosial (M.Sos)  
Pada Program Studi Magister Studi Pembangunan

Konsentrasi : Keuangan dan Aset Daerah

Oleh :

**DEDY NOOR IRAWAN**

**NIM. 1920422310020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2022**

## ABSTRAK

Dedy Noor Irawan, 2022. **Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Belanja Modal Dan Rasio Belanja Transfer Ke Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten Tanah Bumbu**. Tesis, Program Studi Magister Studi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat. Muhammad Anshar Nur sebagai Pembimbing I dan Andi Tenri Sompas sebagai Pembimbing II .

Rasio kemandirian keuangan, desentralisasi fiskal, belanja modal dan belanja transfer ke desa dinilai berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Salah satunya diduga juga terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Ketergantungan pada pendapatan pusat dinilai masih tinggi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian finansial, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio belanja transfer ke desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didukung oleh data sekunder. Ruang lingkup penelitian ini meliputi beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio belanja transfer ke desa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, periode penelitian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel dan diolah menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Rasio kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Rasio Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, rasio belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, rasio belanja transfer ke desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu dan secara simultan belum berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

**Kata kunci:** Rasio Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Belanja Transfer kedesa, Tingkat Kemiskinan.

## ABSTRACT

*Dedy Noor Irawan, 2022. Analysis Of The Effect Of Financial Independence Ratios, Fiscal Decentralization Ratios, Capital Expenditure Ratios And Transfer Spending Ratios To Villages On Poverty Levels In Tanah Bumbu Regency. Thesis, Master of Development Studies Program, Lambung Mangkurat University. Muhammad Anshar Nur as Supervisor I and Andi Tenri Sompas as Supervisor II.*

*The ratio of financial independence, fiscal decentralization, capital expenditure and transfer expenditure is considered to have an effect on poverty levels, one of which is also suspected to have occurred in Tanah Bumbu Regency. Dependence on central income is still considered high, while Regional Original Revenue (PAD) should be the main resource.*

*This study aims to analyze the effect of financial independence ratios, fiscal decentralization ratios, capital expenditure ratios and transfer spending ratios to villages on the poverty level in Tanah Bumbu Regency. The type of research used in this research is quantitative research supported by secondary data. The scope of this study includes several variables that affect the poverty level in Tanah Bumbu Regency in South Kalimantan Province in 2012 to 2021, namely the ratio of financial independence, the ratio of fiscal decentralization, the ratio of capital expenditures and the ratio of transfer spending to villages. The location of this research was carried out in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province, the research period was from 2012 to 2021. Data were collected through documentation. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression analysis using panel data and processed using the SPSS program.*

*The results can be concluded the ratio of financial independence has a negative and significant effect on the poverty level, the ratio of fiscal decentralization has a positive and significant effect on the poverty level, the capital expenditure ratio has no significant effect on poverty, the ratio of transfer spending to villages has no effect on poverty in Tanah Bumbu Regency and simultaneously has no effect on poverty in Tanah Bumbu Regency.*

**Keywords:** *Financial Independence Ratio, Fiscal Decentralization, Capital Expenditure, Transfer Expenditure to Villages, Poverty Level.*

Banjarmasin, Juli 2022

Approved by:

Head of Language Centre

Prof. Dr. Fatchul Mu'in, M.Hum

NIP 196103041989031003

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, atas berkat Rahmat Allah SWT peneliti diberi kesempatan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Manurung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu” dengan baik dan lancar.

Dalam proses penelitian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga memudahkan dalam menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang telah menerima dan memberikan fasilitas dalam penyelesaian Program Studi Pascasarjana Pembangunan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, S.Sos., M.P.A selaku Koordinator Program Studi Magister Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat sekaligus juga sebagai penguji 2.
4. Bapak Dr. Ir. Muhammad Anshar Nur, MM. selaku sebagai Pembimbing pertama yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan dorongan semangat hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Dr. Andi Tenri Sempa, S.IP., M.Si selaku Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu yang berharga memberikan bimbingan hingga tesis ini dapat selesai.

6. Bapak Dr. Ahmad Yunani, S.E., M.Si selaku Penguji 1 yang memberikan saran dan masukan konstruktif dalam penulisan tesis ini
7. Sahabat mahasiswa Angkatan 2019 Program studi Magister Studi Pembangunan yang banyak membantu dan memotivasi agar segera menyelesaikan studi ini.
8. Ibundaku “Saringsih” yang selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya sehingga termotivasi olehnya.
9. Istriku Nani Widyastuti dan Putraku Dyan Irawan serta Putriku Dyan Irawan dan Dyna Irawan yang selalu menemani dan memberi *support* positif.
10. Seluruh kakawanan di BPKAD Tanah Bumbu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati serta berterima kasih atas segala saran dan kritik demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Akhirnya semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan pertolongan dan Ridha dari Allah SWT. Aamiin.

Tanah Bumbu,  
Penulis,

**Dedy Noor Irawan**  
NIM. 1920422310020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Pembangunan Daerah.....	13
2.2.2 Pembiayaan Daerah.....	17
2.2.3 Belanja Daerah.....	23
2.2.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	31
2.2.5 Rasio Desentralisasi Fiskal.....	34
2.2.6 Belanja Modal.....	36
2.2.7 Dana Transfer ke Desa .....	38
2.2.8 Kemiskinan.....	42
2.2.9 Ukuran Kemiskinan .....	46

2.3 Model Penelitian.....	47
2.4 Hipotesis Penelitian .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	50
3.2 Jenis Penelitian.....	50
3.3 Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian .....	50
3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan data .....	52
3.6 Teknik Analisis Data .....	52
3.6.1 Analisis Data Regresi Linier Berganda.....	52
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
3.6.3 Pengujian Hipotesis.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	60
4.1.1 Keadaan Geografis .....	60
4.1.2 Iklim.....	61
4.1.3 Administrasi Pemerintahan.....	62
4.1.4 Lembaga Legislatif.....	62
4.1.5 Sumber Daya Manusia.....	62
4.2 Analisis data.....	63
4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan.....	63
4.2.2 Rasio Desentralisasi Fiskal .....	64
4.2.3 Rasio Belanja Modal .....	66
4.2.4 Rasio Belanja Transfer ke Desa .....	67
4.2.5 Kemiskinan .....	69
4.2.6 Pengujian Asumsi Klasik.....	70

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	76
4.3.1. Rasio Kemandirian Keuangan.....	76
4.3.2. Rasio Desentralisasi Fiskal .....	80
4.3.3. Rasio Belanja Modal .....	82
4.3.4. Rasio Belanja Transfer ke Desa .....	83
4.3.5. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Prosentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan .....	
tahun 2012-2021.....	<b>7</b>
Tabel 2.1. Kemandirian keuangan daerah.....	<b>33</b>
Tabel 2.2. Desentralisasi Fiskal Keuangan .....	<b>35</b>
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan, 2020.....	<b>61</b>
Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Keuangan .....	<b>64</b>
Tabel 4.3 Rasio Desentralisasi Fiskal .....	<b>65</b>
Tabel 4.4 Rasio Belanja Modal .....	<b>66</b>
Tabel 4.5 Rasio Belanja Transfer ke Desa .....	<b>68</b>
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	<b>71</b>
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas .....	<b>72</b>
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	<b>73</b>
Tabel 4.9 Hasil Uji Run Test.....	<b>74</b>
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis .....	<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....	48
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Bumbu .....	
tahun 2012-2021 .....	69
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	75
Gambar 4.3 Kurva t hitung .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan bernegara, dan merupakan salah satu komponen dari administrasi publik, karena salah satu tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, administrasi publik merupakan alat, wadah atau tempat dalam mewujudkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan langsung dengan hubungan pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan yang dibawahnya.

Adanya desentralisasi fiskal dimaksudkan daerah mempunyai kewenangan dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, mengelola keuangannya sendiri, dan mempergunakannya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber pendapatan sesuai potensi yang dimiliki.

Prinsip dan desentralisasi fiskal tersebut adalah dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya, kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang. Sehingga mampu mencapai target sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Salah satu bagian yang paling penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan daerahnya sendiri dalam rangka perwujudan otonomi daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembiayaan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber dan pendapatan yang diperlukan daerah. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi komponen dalam administrasi publik sama dengan halnya desentralisasi fiskal. Karena mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Administrasi publik berperan sebagai alat atau wadah dalam melaksanakan kemandirian keuangan daerah.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan, keuangan pusat dan daerah. Idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sehingga daerah harus benar-benar otonom, tidak lagi bergantung ke daerah pusat.

Realita yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia pasca otonomi daerah bergulir dalam hal pembelanjaan ialah bahwa share atau bagian belanja untuk pembangunan dan kehidupan sosial masih lebih rendah dibandingkan dengan belanja rutin dan operasional. Jika bagian belanja pembangunan atau belanja modal dan belanja sosial lebih rendah dari belanja rutin dan operasional maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat terutama terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu pengeluaran pemerintah juga memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu jika pertumbuhan ekonomi rendah setiap periodenya pasti akan berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat terutama terhadap tingkat kemiskinan. Anggaran pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu sampai saat ini masih mengandalkan dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Peranan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengurangi tingkat kemiskinan tercermin dalam realisasi pembelanjaan dalam APBD setiap tahunnya terutama dalam realisasi pembelanjaan dalam pos belanja modal dan belanja sosial. Pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Usaha pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan kesejahteraan dalam hal ini mengurangi tingkat kemiskinan juga dapat dilihat dari besaran dana atau belanja yang dikucurkan setiap tahunnya baik dalam sisi belanja

Operasional maupun belanja Modal. Namun realisasi belanja yang diharapkan dapat menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan adalah melalui belanja daerah yang direalisasikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi, baik dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan yang layak. Kondisi seseorang sebagai penyebab kemiskinan bisa terjadi secara alami, kultural, dan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang misalnya cacat mental atau fisik, usia yang sudah tidak produktif sehingga tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan lain-lain. Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi kultur masyarakat tertentu, misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktural misalnya belum tepatnya sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat. Kemiskinan struktural mempunyai pengaruh yang besar, karena dampak terhadap masyarakat yang ditimbulkan akan sangat luas. Bentuk kemiskinan inilah yang terjadi di berbagai negara saat ini bukan hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Setiadi & Kolip (2011) Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Masalah kemiskinan belum dapat teratasi secara optimal

juga diakibatkan karena faktor penyebab kemiskinan yang beragam dan kompleks. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan bukan hanya faktor ekonomi saja. Dengan melihat faktor kemiskinan maka dapat diketahui cara untuk meminimalisir kemiskinan tersebut.

Salah satu fokus dari Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah pembangunan infrastruktur selain pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui alokasi Anggaran Infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja namun lebih kepada belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik. Melihat data belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

Belanja APBD Tahun 2020, belanja modal pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kotamadya hanya sekitar 18%. Angka tersebut jauh di bawah belanja pegawai yang mencapai 34% atau belanja barang dan jasa yang di kisaran 25%. Kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) memang menjadi tambahan beban bagi daerah sehingga menambah jenis belanja daerah yang telah ditentukan seperti belanja pendidikan, kesehatan serta Alokasi Dana Desa (ADD). Ketidapatuhan daerah terkait pemenuhan belanja tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penundaan

DAU atau DBH sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

Daerah yang telah memenuhi besaran alokasi belanja infrastruktur di APBD tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu dari 248 daerah menjadi 354 daerah. Daerah yang belum mampu memenuhi kewajiban terkait pemenuhan belanja infrastruktur daerah hanya sekitar 34% dari total 542 pemerintah daerah.

Merdekawati dan Budiantara (2013) menyebutkan bahwa belanja langsung diarahkan kepada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan yang lebih baik. Adanya pengalokasian belanja daerah untuk belanja modal berpengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini menandakan alokasi belanja daerah yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik dalam mengurangi kemiskinan di daerah.

Usaha untuk mengimplementasikan otonomi daerah dengan diberikan Pendanaan dari Pusat berupa desentralisasi keuangan yang menuntut untuk kemandirian daerah dalam mengelola pendapatan dan keuangan daerah tidak serta merta menyelesaikan permasalahan daerah, contohnya dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang selama 10 (sepuluh) tahun terakhir memiliki Persentase Penduduk Miskin (P0) cukup besar dan konsisten. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se

Provinsi Kalimantan Selatan Prosentasi Penduduk Miskin, Kabupaten Tanah Bumbu menduduki peringkat ke 9 dari 14 Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan sesuai dengan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Kecuali pada tahun 2021, Kabupaten Tanah Bumbu menduduki peringkat ke 5.

Tabel 1.1. Prosentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021.

No	Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (P0)									
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	4.83	4.38	4.55	4.54	4.73	4.85	4.99	4.68	4.77	5.06
2	TANAH LAUT	4.57	4.26	4.51	4.40	4.60	4.65	4.58	4.38	4.33	4.55
3	KOTABARU	4.86	4.22	4.49	4.52	4.38	4.56	4.62	4.76	4.73	4.85
4	BANJAR	3.04	2.55	2.72	2.70	2.96	3.10	3.26	2.87	2.84	2.97
5	BARITO KUALA	5.11	4.51	4.63	4.56	5.13	5.22	5.37	5.19	5.12	5.12
6	TAPIN	3.60	3.06	3.41	3.70	3.77	3.70	3.88	3.63	3.41	4.99
7	HULU SUNGAI SELATAN	4.84	5.17	5.33	5.21	5.80	6.29	6.45	6.77	6.67	6.90
8	HULU SUNGAI TENGAH	6.18	5.64	5.93	6.01	6.09	6.18	5.81	5.65	5.57	5.68
9	HULU SUNGAI UTARA	6.83	6.14	6.50	6.38	6.65	6.76	7.07	7.00	6.92	6.94
10	TABALONG	6.27	5.72	6.01	5.95	6.09	6.35	6.59	6.21	6.15	5.83
11	TANAH BUMBU	4.82	4.60	4.85	4.88	4.99	5.27	5.55	5.21	5.20	5.47
12	BALANGAN	6.07	5.32	5.55	5.59	5.68	5.67	5.87	6.29	6.17	6.85
13	KOTA BANJARMASIN	4.89	4.39	4.20	4.18	4.19	4.22	4.44	4.27	4.21	4.51
14	KOTA BANJAR BARU	4.40	4.01	4.30	4.19	4.68	4.62	4.90	4.35	4.50	5.16

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Selatan, 2022

Penelitian Jalu Aji Prakoso, Fitrah Sari Islami, Rr Retno Sugiharti (2019) menunjukkan bahwa variable kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif atas kemiskinan di Jawa Tengah, dalam penelitian Alla Asmara dan Stannia Cahaya Suci (2014) juga menyebutkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dalam peningkatan kemiskinan di Provinsi Banten. Kemudian dalam penelitian Jajuk Suprijati, Shanty Ratna Damayanti, Darto Irawan (2019) Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Propinsi Papua serta penelitian Mukarramah (2020) menjelaskan bahwa belanja modal,

indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terserap secara simultan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Sehingga perlu digabungkan beberapa faktor yang berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan mengingat pentingnya upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu karena dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian daerah. Serta dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dalam Misi pertama tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sasaran nomor 4 adalah menurunnya angka kemiskinan yang ditargetkan pada akhir RPJMD tahun 2026 menurun menjadi 3,87%. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Belanja Modal dan Rasio Belanja Transfer ke Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten Tanah Bumbu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh rasio kemandirian keuangan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021?
2. Apakah pengaruh rasio desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021?
3. Apakah pengaruh rasio belanja modal terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021?

4. Apakah pengaruh rasio dana transfer ke desa terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021?
5. Apakah pengaruh secara simultan rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio dana transfer ke desa terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

2. Untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian keuangan terhadap tingkat pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh rasio desentralisasi fiskal terhadap tingkat pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh rasio belanja modal terhadap tingkat pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021.
5. Untuk menganalisis pengaruh rasio belanja transfer ke desa terhadap tingkat pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021.
6. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio belanja transfer ke desa terhadap tingkat pada Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Peneliti

Penelitian diharapkan sebagai media untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penganggaran daerah dan di-sisi lain berguna untuk pemahaman metode penelitian

## 2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

## 3. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi peneliti berikutnya pengetahuan di bidang keuangan khususnya keuangan daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Oleh karena itu peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian terkait permasalahan kemiskinan. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang membahas permasalahan kemiskinan :

1. Jalu Aji Prakoso, Fitrah Sari Islami, Rr Retno Sugiharti (2019), judul penelitian Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah dengan metode penelitian kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, terdapat pengaruh negatif signifikan atas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan.
2. Alla Asmara dan Stannia Cahaya Suci (2014), judul penelitian Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten dengan metode penelitian kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Kemandirian keuangan daerah (rasio PAD) berpengaruh negatif terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Banten.
3. Andri Widiyanto, Erni Unggul Sedyta Utami dan Asrofi Langgeng Nurmansyah (2008), judul penelitian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

dengan metode penelitian kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

4. Jajuk Suprijati, Shanty Ratna Damayanti, Darto Irawan (2009), judul penelitiannya Desentralisasi Fiskal Dan Kemiskinan Di Provinsi Papua dengan metode penelitian kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Pengaruh parsial yang signifikan dari faktor variabel bebas yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal terhadap Tingkat Kemiskinan.
5. Kritianus Hiktaop (2015), judul penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan di Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengaruh antara desentralisasi fiskal belum berperan secara maksimal dalam menurunkan kemiskinan pada Kabupaten/Kota se Propinsi Papua.
6. Mukarramah (2020), judul penelitian Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Aceh dengan metode penelitian kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terserap secara simultan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terserap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian terdahulu adalah variable terikat (*dependent variable*) adalah tentang kemiskinan sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu adalah selain lokus penelitian yang berbeda, juga dari variable bebas (*independent variable*) yang hanya terdiri dari 1,2 atau 3 variable bebas. Hal ini menurut peneliti jika digabungkan variable bebas tersebut akan mendapatkan analisis yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan di lokus penelitian.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pembangunan Daerah**

Indonesia adalah negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan, dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik. (effendi, 2002)

Adanya pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada) harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2010)

Menurut Todaro (2003) pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu:

1. Ketahanan (*sustenance*)

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi)

2. Harga diri (*self esteem*)

Pembangunan haruslah memanusiaikan. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3. Kebebasan (*Freedom for servitude*)

Kebebasan bagi individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya, untuk sekedar mengganti barang-barang modal yang habis atau rusak. Akan tetapi untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal dan jika kita mengonsumsi adanya hubungan ekonomi langsung antara jumlah total persediaan modal. Teori pertumbuhan Haardom yang secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto dan rasio modal output nasional. Secara lebih spesifik teori ini menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio tabungan.

Secara sederhana pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, akan tetapi akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Teori ini menunjukkan sebuah kenyataan yang cenderung diabaikan oleh Keynes yaitu jika pada suatu periode tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut akan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan kapasitas produksi bertambah, akan tetapi pendapatan nasional baru akan mengalami kenaikan hanya jika terjadi kenaikan pengeluaran masyarakat.

Krisis ekonomi memberikan dampak yang berbeda terhadap daerah meskipun pada dasarnya menurunkan perekonomian di semua daerah tetapi pengembangan perekonomian dan daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami hambatan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam,

ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Masalah lain yang menghambat adalah tidak tertibnya pemanfaatan ruang yang didasarkan pada penataan ruang dan kepemilikan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan degradasi lingkungan.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pembangunan secara lebih adil dan berimbang perubahan paradigma itu antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan diatur undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik berupa retribusi daerah, pajak pendapatan serta pendapatan lain-lain. Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat karena pelaksanaan pembangunan nasional berada didaerah, maka rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari kerangka umum pola pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang.

Salah satu aspek penting dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi penerimaan daerah, Karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapat sangatlah bervariasi dan tergantung pada kondisi dimana masing-masih daerah yang memiliki kekayaan masing-masing daerah yang

memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah yang intensitas ekonomi yang tinggi ataupun rendah. Ini semua berdampak pada besar kecilnya pajak di daerah yang bersangkutan.

### **2.2.2 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan neto dan jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran. (Kunarjo, 2002:98).

Perencanaan pembangunan yang selama ini dianggap lebih efisien dalam pengaturan produksi dan distribusi, tidak luput pula dari kelemahan-kelemahan seperti perencanaan biasanya dianggap sangat kaku dan seolah-olah rencana yang telah dibuat merupakan pedoman umum yang harus diikuti, pelaksanaannya biasanya tidak sesuai dengan sasaran, karena adanya perubahan-perubahan eksternal yang tidak mampu diperhitungkan sebelumnya dan sebagainya serta negara yang sedang berkembang kurang mampu untuk menanggulangi masalah pembiayaan. Untuk melaksanakan suatu rencana, maka diperlukan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut bukan saja dari sumber pemerintah, tetapi juga dari sumber masyarakat. Oleh karena itu, dapat melakukan pembiayaan pembangunan menurut apa yang telah direncanakan, diperlukan peningkatan sumber-sumber dana dan menggunakannya secara lebih efisien.

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana asas dekonsentrasi dan pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi biayai atas beban APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi, APBD dan perhitungan APBD merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

i. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1) pajak daerah;

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

2) retribusi daerah;

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah

4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c) hasil kerja sama daerah
- d) jasa giro
- e) hasil pengelolaan dana bergulir
- f) pendapatan bunga
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah

- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k) pendapatan denda pajak daerah
- l) pendapatan denda retribusi daerah
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n) pendapatan dari pengembalian
- o) pendapatan dari BLUD
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ii. Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas :
  - a) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
  - b) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

- c) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
  - d) Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
  - e) Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
  - f) Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) transfer antar-daerah, terdiri atas :
- a) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
  - b) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

iii. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1) Hibah;

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Dana Darurat; dan/atau

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu

ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya

### **2.2.3 Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-

masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55, klasifikasi belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan. belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai digunakan dengan memperhatikan ketentuan:

- 1) Belanja untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai.
- 3) Belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acres yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Belanja penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK.
- 5) Belanja penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK
- 6) Belanja tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah.
- 8) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah.

Belanja barang jasa digunakan untuk :

- 1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
- 2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
- 3) Belanja Pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna

barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- 5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD.

d. Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD

penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada:

- 1) Pemerintah Pusat;
- 2) Pemerintah Daerah lainnya;
- 3) Badan Usaha Milik Negara;
- 4) BUMD; dan/atau
- 5) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- 6) Partai Politik.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

- 1) individu;
- 2) keluarga;
- 3) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
- 4) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

## 2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

## 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk :

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah

#### 4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

##### a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- 1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
- 2) Pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

##### b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) Bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- 3) Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### **2.2.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim, 2007;231)

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang

potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Abdul Halim, 2007;232).

Analisis kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrove, Richard A, dan B Musgrove, Peggy dalam bukunya “Public Finance In Theory and Practice (dalam Rekso Hadipradjo, Ekonomi publik)”, namun dalam penerapannya disesuaikan dengan kemampuan dalam APBD. Menurut Abdul halim (2002;128) menyatakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD dapat dipakai untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, serta debt service coverage.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah (Ihyaal Ulum, 2009;31).

Rasio Kemandirian Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Propinsi}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah seperti, dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) (Abdul Halim, 2007;234).

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Abdul Halim 2002;128).

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Kemandirian keuangan daerah.

Kemampuan Kinerja Keuangan	Prosentase Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 – 25%
Rendah	25 – 50 %
Sedang	50 – 75 %
Tinggi	75 – 100 %

Sumber : (Halim, 2010:34 dalam Arson, 2011).

- 1) Rendah sekali, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Rendah, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- 3) Sedang, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Tinggi, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Lazyra, 2016; 28).

#### **2.2.5 Rasio Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah (Mardiasmo 2002;6)

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2010: 142).

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Bisma 2010 ; 78).

Rasio desentralisasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Desentralisasi fiskal keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Desentralisasi Fiskal Keuangan

Kemampuan Kinerja Keuangan	Prosentase Kemendirian (%)
Sangat Kurang	0 – 10,00%
Kurang	10,01 – 20,00 %
Sedang	20,01 – 30,00 %
Cukup	30,01 – 40,00 %
Baik	40,01 – 50,00 %
Sangat Baik	>50%

Sumber : (tim litbang depdagri dalam Andri Haryanto 2014)

Mudrajad Kuncoro (2014; 49) Prinsip Desentralisasi Fiskal Pada pasal 2 UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah :

- 1) Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Pemberian sumber Keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas Pemerintah

Daerah dengan memperhatikan Stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antardaerah.

- 3) Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

#### **2.2.6 Belanja Modal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,

pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.7 Dana Transfer ke Desa**

Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003). Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (*policy science*), yaitu ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuantujuan demokrasi Evaluasi

adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002). Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Menurut Said Zainal Abidin (2004:215) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian, yaitu.

- a. Evaluasi awal, sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan.
- b. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring.
- c. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Alokasi dana desa (ADD) adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
- b. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
- c. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot
- d. Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya: kemiskinan, penduduk, pendidikan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan wilayah, jumlah komunitas, potensi desa). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
  - a. Besarnya ADDM adalah 60 persen dari jumlah ADD dan besarnya
  - e. ADDP (dana proporsional) adalah 40 persen dari jumlah ADD.
  - f. Perhitungan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pempdes) Kabupaten Tanah Bumbu.
  - g. Rincian perhitungan ADD masing-masing desa ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penetapan Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

### **2.2.8 Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam Rp (Rupiah) per kapita per bulan di sisi yang lain, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) sebagai tolok ukur definisi kemiskinan diterjemahkan sebagai kondisi kurang akibat kebutuhan hidup (makanan, minuman, pakaian, rumah) selama satu bulan berdasarkan jumlah kalori,

protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak untuk seorang pekerja. Kebutuhan konsumsi harus memenuhi 2100 kalori per hari (kelompok makanan) ditambah dengan kebutuhan (bukan makanan) minimal lainnya yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan (Soesastro, 2005).

Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan

- b. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. Population growth, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- d. Resources management and the environment, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tanah kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. Exploitative intermediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir. Internal political fragmentation and civil strife, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

- i. Interbational processe, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

### **2.2.9 Ukuran Kemiskinan**

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Suryawati, 2005), yaitu:

- a. Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian perorang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
- b. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua

anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

Ukuran kemiskinan menurut Foster-Greer-Thorbecke (dalam Todaro, 2004):

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Dimana:

$P_0$  = Prosentase penduduk miskin

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (  $i = 1, 2, 3, \dots, q$  ),  $y_i < z$  .

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

$n$  = Jumlah penduduk.

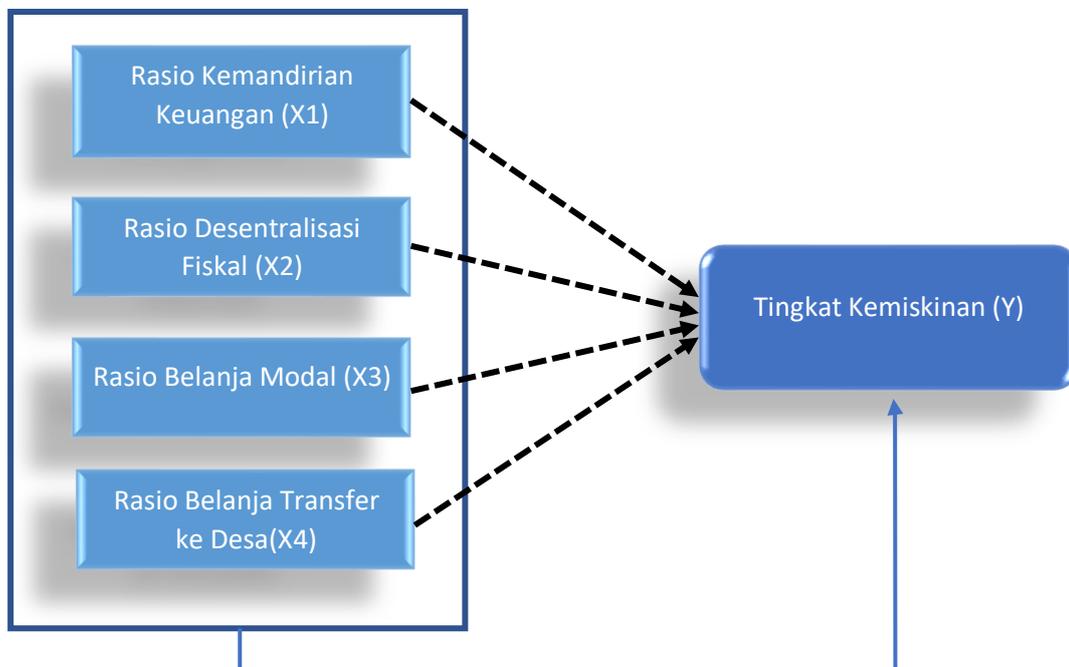
Penjelasan :

Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

### 2.3 Model Penelitian

Kemiskinan menjadi permasalahan yang mendasar dalam perekonomian baik dalam suatu negara maupun daerah, karena sifatnya yang kompleks dan multidimensional. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah harus kuat

dalam pendanaan keuangan, pendanaan tersebut dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Pendapatan lain-lain yang sah. Jika pendapatan sudah kuat, belanja dalam perencanaan pembangunan nasional atau daerah haruslah yang berkonsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan seperti belanja yang lebih diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Kerangka konsep penelitian ini di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara/ kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang ada yang diajukan oleh peneliti dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu,  
Rasio kemandirian keuangan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu,  
Rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Rasio modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu,  
Rasio modal tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Rasio belanja transfer ke desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu,  
Rasio belanja transfer ke desa tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio belanja transfer ke desa secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten Tanah Bumbu,  
Rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio belanja transfer ke desa secara simultan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio belanja transfer ke desa.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data faktual dan penyimpulan dengan didukung data-data sekunder.

#### **3.3 Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, periode penelitian ini dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

#### **3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep sosial yang sudah diterjemahkan menjadi satuan yang lebih operasional, atau sebagian unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu dari variabel (Singarimbun dan Effendi 2008). Berikut dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel yang tertera dalam kerangka berfikir, yaitu:

1. Tingkat kemiskinan adalah prosentase penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu pada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021 yang berada di bawah garis kemiskinan (dalam satuan persen), data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, data diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012-2021;
3. Rasio desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, data diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012-2021;
4. Rasio belanja modal adalah realisasi belanja dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dibandingkan dengan total belanja daerah dalam tahun berkenaan, data diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012-2021;
5. Rasio belanja transfer ke desa adalah belanja pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dibandingkan dengan total

jumlah belanja tahun berkenan, data diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012-2021.

### **3.5 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data atau mencari informasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang didapat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Prosentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel dan diolah menggunakan program SPSS. Data panel yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara periode penelitian (tahun 2011-2020) dengan data variabel yang dilihat adalah tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu dan Belanja barang jasa, belanja modal dan belanja transfer ke desa.

#### **3.6.1 Analisis Data Regresi Linier Berganda**

Menurut widarjono (2007), perhatian utama regresi pada dasarnya adalah menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. persamaan regresi populasi hanya dapat diestimasi dengan menggunakan data sampel sehingga persoalan penting di dalam membuat garis regresi simple mendapatkan garis

regresi yang nilai prediksinya sedekat mungkin dengan data aktualnya. Sugiyono (2012), analisis regresi berganda digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor diubah nilainya. analisis regresi berganda akan dilakukan jika jumlah variabel independennya minimal dua. persamaan matematis analisis regresi berganda Dalam penelitian ini pengujian rumus hipotesis penelitian akan dilakukan melalui persamaan analisis regresi linear berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu

$\alpha$  = konstanta

b = koefisien regresi

X1= rasio kemandirian keuangan

X2= rasio desentralisasi fiskal

X3= rasio belanja modal

X4 = rasio belanja transfer ke desa

e = error term

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier

Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi yang akan dibahas lebih lanjut satu per satu pada bagian selanjutnya.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk dapat menguji apakah data yang akan digunakan untuk uji hipotesis yaitu data dari variabel dependen dan independen yang digunakan telah berdistribusi secara normal ataukah tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan uji dengan analisis statistik yaitu uji Kolmogrov-Smirnov. Pada pengujian Kolmogrov-Smirnov ini. Data dikatakan memenuhi uji normalitas dan memenuhi kriteria dari BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) apabila data dinyatakan berdistribusi dengan normal. Untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi yang normal atau tidak melalui uji Kolmogrov-Smirnov yaitu berdasarkan asumsi berikut:

- 1) Data dikatakan berdistribusi normal apabila pada hasil uji Kolmogrov-Smirnov terhadap nilai residual dari analisis regresi

linier berganda, dihasilkan nilai signifikansi yang besarnya  $> 0,05$ .

- 2) Data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila pada hasil uji Kolmogrov-Smirnov terhadap nilai residual dari analisis regresi linier berganda, dihasilkan nilai signifikansi yang besarnya  $< 0,05$ .

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini ditujukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya berhubungan secara linier atau saling berkorelasi. Model regresi dinyatakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) apabila tidak terdapat multikolinieritas. Multikolinieritas dapat diketahui melalui beberapa pengujian salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung nilai VIF dan Tolerance dari masing-masing variabel bebas. Untuk mengetahui apakah pada data penelitian mengandung multikolinieritas atau tidak, dapat didasarkan pada asumsi berikut:

- 1) Apabila nilai  $VIF > 10$  dan nilai  $Tolerance < 0.1$ , maka data dapat dikatakan mengandung multikolinieritas.
- 2) Apabila nilai  $VIF < 10$  dan nilai  $Tolerance > 0.1$ , maka data dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk dapat menguji apakah model regresi memiliki keragaman error yang sama atau tidak. Asumsi keragaman error yang sama ini disebut dengan heteroskedastisitas, sedangkan heteroskedastisitas yaitu terjadi jika keragaman nilai errornya tidak konstan atau berbeda. Hendaknya untuk dapat memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), nilai error pada setiap pengamatan nilainya konstan. Apabila pada data setelah dilakukan pengujian dinyatakan mengandung heteroskedastisitas maka terjadi penyimpangan syarat asumsi klasik, dimana terdapat syarat dalam kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), model regresi harusnya tidak mengandung heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui beberapa pengujian salah satunya yaitu Uji Gletser dimana melakukan uji regresi variabel bebas pada nilai residual yang telah diabsolutkan. Nilai residual ini dihasilkan melalui analisis regresi linier berganda pada data penelitian. Untuk mengetahui apakah pada data mengandung heteroskedastisitas atau tidak, dapat didasarkan pada asumsi berikut:

- 1) Apabila dari hasil uji gletser ditemukan bahwa nilai signifikansi dari variabel independen terhadap nilai absolut residual  $<$  taraf signifikan yang ditentukan (0,05), maka data dapat dikatakan mengandung heteroskedastisitas.

- 2) Apabila dari hasil uji gletser ditemukan bahwa nilai signifikansi dari variabel independen terhadap nilai absolut residual  $>$  taraf signifikan yang ditentukan (0,05), maka data yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk dapat menguji model regresi yang akan digunakan, apakah terdapat korelasi antara error pada pengamatan satu dengan error pada pengamatan sebelumnya atau tidak. Apabila terjadi korelasi antarpengamatan dalam runtut waktu, maka dapat dikatakan ada problema autokorelasi. Data dinyatakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) apabila pada data dinyatakan tidak mengandung autokorelasi. Untuk mengetahui apakah dari data yang ada terdapat autokorelasi atau tidak, dapat menggunakan uji Runs Test. Berdasarkan uji runs, data dikatakan mengandung autokorelasi atau tidak berdasarkan asumsi dibawah ini:

- 1) Apabila hasil uji runs menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $<$  taraf signifikan yang ditetapkan (0.05), maka dapat dikatakan data penelitian mengandung autokorelasi.
- 2) Apabila hasil uji runs menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $>$  taraf signifikan yang ditetapkan (0.05), maka dapat dikatakan data penelitian tidak mengandung autokorelasi.

### 3.6.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penilaian ini dilakukan dengan cara :

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen/bebas dengan variabel dependen/terikat dalam suatu persamaan regresi. Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel bebas menerangkan atau menjelaskan variabel Y. (Gujarati & Porter, 2011) Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

#### b. Uji F Statistik

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

a.  $H_0$  = Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b.  $H_a$  = Variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Apabila angka sign-F atau tingkat prob-F kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak, hal ini berarti variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Sebaliknya jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, hal ini berarti bahwa variabel secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikatnya.

c. Uji t Statistik

Uji t statistik pada dasarnya untuk melihat pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

- a.  $H_0$  = Masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b.  $H_a$  = Masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Apabila nilai prob-t atau sig-t kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Sebaliknya apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berarti bahwa variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya secara individual.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### 4.1.1 Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara: 2052' – 3047' Lintang Selatan dan 115015' – 116004' Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan : Kabupaten Kotabaru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Kabupaten yang beribukota di Batulicin ini memiliki 12 (dua belas) kecamatan yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Karang Bintang, Simpang Empat, Mantewe, Kuranji, Angsana, Teluk Kepayang dan Kusan Tengah. Dua kecamatan yang terakhir disebutkan adalah kecamatan hasil pemekaran pada 2021 lalu.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4.890,30 km<sup>2</sup> (489.030 Ha) atau 13,03 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang mencakup 30,74 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil sebesar 114,64 Km<sup>2</sup> atau hanya 2,34 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut – turut dari kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, Simpang Empat, Angsana, Batulicin, Karang Bintang dan Kuranji.

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan Sub District	Ibukota Kecamatan Capital of Sub District	Luas (km <sup>2</sup> ) Total Area (square.km)
(1)	(2)	(3)
Kusan Hilir	Kota Pagatan	289,01
Sungai Loban	Seri Mulya	382,34
Selui	Sungai Denau	877,97
Angsana	Angsana	193,83
Kusan Hulu	Binawara	1 504,74
Kuranji	Giri Mulya	114,64
Batulicin	Batulicin	133,16
Karang Bintang	Karang Bintang	201,40
Simpang Empat	Kampung Baru	293,48
Mantawe	Mantawe	893,74
<b>Tanah Bumbu</b>		<b>4 890,31</b>
<b>Kalimantan Selatan</b>		<b>37 530,52</b>

Sumber : Kabupaten Tanah Bumbu dalam angka 2021

#### 4.1.2 Iklim

Dari hasil pantauan Stasiun Meteorologi Syamsir Alam Kotabaru, selama tahun 2020 kelembapan udara rata-rata perbulan berkisar antara 81 persen sampai 88 persen dengan kelembapan maksimum tertinggi sebesar 98 persen terjadi di bulan November. Sedangkan kelembapan minimum terendah sebesar 58 persen terjadi di bulan Oktober. Sedangkan temperatur udara rata – rata per bulan selama tahun 2020 berkisar antara 26,20 C hingga 27,80 C, dengan suhu udara maksimum tertinggi pada bulan Januari sebesar 32,30 C dan minimum terendah sebesar 24,00 C di bulan Juli. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juli yaitu sebesar 576,6 mm<sup>3</sup> dan terendah di bulan November sebesar 121,7 mm<sup>3</sup>. Sedangkan Jumlah hari

hujan terbanyak yaitu selama 26 hari terjadi di bulan Juli. Sementara kecepatan angin maksimum mencapai 3,7 knot pada bulan Februari.

#### 4.1.3 Administrasi Pemerintahan

Tahun 2020 Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan. dengan 144 desa dan 5 (lima) kelurahan. dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Batulicin. Kecamatan Kusan Hilir yang memiliki 34 desa dan 1 (satu) kelurahan merupakan kecamatan yang memiliki desa paling banyak. Sebaliknya Kecamatan Kuranji hanya memiliki 7 (tujuh) desa.

#### 4.1.4 Lembaga Legislatif

Komposisi anggota lembaga legislatif DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2020 mengalami perubahan dibandingkan pada periode sebelumnya sebelumnya. Di akhir tahun 2020, jumlah anggota berkurang dari 35 orang menjadi 34 orang. Fraksi PDI Perjuangan terbanyak memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang. Fraksi Golongan Karya dan Fraksi Gerindra masing-masing memiliki anggota sebanyak 6 (enam) orang. Fraksi lainnya adalah Fraksi PKB yang terdiri atas 5 (lima) orang dan Fraksi Amanat Nasional Demokrat dengan jumlah 3 (tiga) orang. Namun, jumlah anggota berkurang karena Sebanyak 29 dari 34 Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah laki – laki. Hanya 5 (lima) orang perempuan dari Partai PDIP, PKB, dan Partai Amanat Nasional

#### 4.1.5 Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan roda pemerintahan, dibentuklah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Sampai tahun 2020. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, terdiri dari 3

(tiga) Asisten, 5 (lima) staff ahli, 1 (satu) Sekretariat Daerah. 1 (satu) Sekretariat DPRD, 19 Dinas, 4 Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Satpol PP dan Damkar, Ditambah dengan Kantor Kecamatan dan Kelurahan. Lembaga teknis lain yang mempunyai tugas khusus dan langsung bertanggung jawab kepada Bupati adalah RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor dan PDAM Tanah Bumbu. Kedua lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur.

## **4.2 Analisis data**

### **4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Propinsi}} \times 100\%$$

Dari data sekunder yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Keuangan

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio
2012	66.535.645.235,00	924.712.099.227,00	7,20%
2013	84.464.231.170,93	854.805.118.743,00	9,88%
2014	118.015.674.952,73	963.632.196.932,00	12,25%
2015	122.363.159.574,86	1.145.612.221.548,00	10,68%
2016	116.116.303.764,95	1.310.001.452.948,00	8,86%
2017	149.588.782.498,27	1.170.951.922.924,00	12,77%
2018	185.351.937.574,98	1.396.796.346.067,00	13,27%
2019	156.455.838.001,83	1.807.384.821.434,00	8,66%
2020	167.344.871.876,69	1.383.561.875.048,00	12,10%
2021	158.296.422.754,00	1.448.929.336.890,00	10,93%

*Sumber : data diolah (2012-2021)*

Jika dilihat dari Tabel 4.2, untuk rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diukur dalam 10 tahun terakhir terbesar 13,27% pada tahun 2018 dan terendah sebesar 7,20% pada tahun 2012. Dengan rasio tersebut masuk ke dalam kategori rendah sekali (0-25%), artinya peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah dan masih sangat dominan dan belum mampu mengoptimalkan penerimaan asli daerah untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah.

#### 4.2.2 Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2010: 142).

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Bisma 2010 ; 78).

Rasio desentralisasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Dari data sekunder yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio
2012	66.535.645.235,00	1.137.694.710.382,00	5,85%
2013	84.464.231.170,93	1.077.624.743.570,43	7,84%
2014	118.015.674.952,73	1.195.948.300.697,23	9,87%
2015	122.363.159.574,86	1.316.488.388.971,86	9,29%
2016	116.116.303.764,95	1.464.481.017.701,95	7,93%
2017	149.588.782.498,27	1.326.169.150.566,27	11,28%
2018	185.351.937.574,98	1.585.860.733.359,98	11,69%
2019	156.455.838.001,83	2.011.797.238.478,83	7,78%
2020	167.344.871.876,69	1.606.289.371.025,69	10,42%
2021	158.296.422.754,00	1.664.669.726.868,00	9,51%

Sumber : data diolah (2012-2021)

Jika dilihat dari Tabel 4.3, untuk rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diukur dalam 10 tahun terakhir terbesar 11,69% pada tahun 2018 dan terendah sebesar 5,85% pada tahun 2012. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, rasio desentralisasi antara 0-10% dikategorikan sangat kurang, tahun 2017 dan 2018 naik menjadi kategori kurang karena diatas 10,01% dan tahun 2019 turun kembali menjadi sangat kurang. Kejadian tersebut berulang

lagi pada tahun 2020 dan 2021, naik menjadi kategori kurang kemudian turun menjadi kategori sangat kurang. Ini menggambarkan bahwa rasio desentralisasi fiskal tergantung pada dana transfer yang didapat dari Pusat dan dari Provinsi sebagai salah satu komponen pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

#### 4.2.3 Rasio Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan,

Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Dari data sekunder yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio
2012	267.465.991.768,00	864.355.973.759,50	30,94%
2013	477.635.137.003,83	1.243.753.320.182,13	38,40%
2014	501.029.417.895,70	1.394.414.615.834,70	35,93%
2015	303.453.096.460,27	1.355.258.610.682,56	22,39%
2016	272.927.192.474,30	1.383.575.856.580,30	19,73%
2017	218.067.547.664,00	1.315.870.107.124,00	16,57%
2018	237.605.641.759,52	1.433.987.565.238,92	16,57%
2019	518.153.250.178,50	1.866.916.811.995,50	27,75%
2020	504.935.572.375,00	1.806.768.412.662,05	27,95%
2021	336.669.629.365,00	1.798.948.467.714,00	18,71%

Sumber : data diolah (2012-2021)

Jika dilihat dari Tabel 4.4, untuk rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diukur dalam 10 tahun terakhir terbesar 38,40% pada tahun 2013 dan terendah sebesar 16,57% pada tahun 2017 dan 2018. Ada trend kenaikan rasio belanja modal mulai dari 2019 dan 2020 diatas 25% tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 18,71%.

#### 4.2.4 Rasio Belanja Transfer ke Desa

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengalokasikan belanja transfer ke desa dalam APBD yang terdiri dari :

- a. Dana Desa, bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Alokasi Dana Desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran berkenan setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rasio belanja transfer ke desa dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Transfer ke Desa} = \frac{\text{Dana Desa} + \text{Alokasi Dana Desa}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Dari data sekunder yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Rasio Belanja Transfer ke Desa

Tahun	Dana Desa + Alokasi Dana Desa	Total Belanja Daerah	Rasio
2012	38.673.365.000,00	864.355.973.759,50	4,47%
2013	44.953.353.104,00	1.243.753.320.182,13	3,61%
2014	63.986.289.319,00	1.394.414.615.834,70	4,59%
2015	184.952.218.653,95	1.355.258.610.682,56	13,65%
2016	182.368.336.242,00	1.383.575.856.580,30	13,18%
2017	191.310.072.100,00	1.315.870.107.124,00	14,54%
2018	194.059.148.901,00	1.433.987.565.238,92	13,53%
2019	237.823.412.015,00	1.866.916.811.995,50	12,74%
2020	108.203.819.886,00	1.806.768.412.662,05	5,99%
2021	225.129.230.702,00	1.798.948.467.714,00	12,51%

Sumber : data diolah (2012-2021)

Jika dilihat dari Tabel 4.5, untuk rasio Belanja Transfer ke Desa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diukur dalam 10 tahun terakhir terbesar 13,65% pada tahun 2015 dan terendah sebesar 3,61% pada tahun 2013. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, baru pada tahun 2015 ada dana APBN yang disalurkan ke desa, sehingga ada kenaikan rasio belanja transfer dari tahun 2014 ke bawah dibandingkan dengan tahun 2015 ke atas. Tetapi Kabupaten Tanah Bumbu sebelum Undang-Undang tentang desa ditetapkan sudah mengalokasikan belanja khusus kepada desa walau tidak sebesar setelah penetapan tahun 2015.

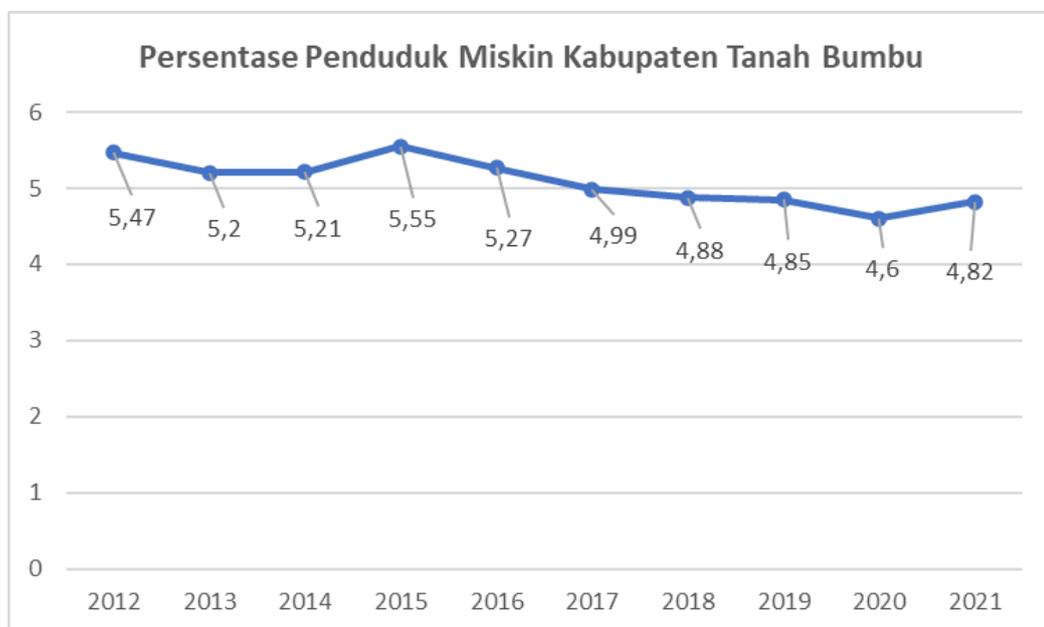
Rasio belanja transfer ke desa juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 5,99%. Karena pengalokasiannya hanya digunakan untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, dan Dana Desa yang bersumber dari APBD tidak

tercatat dalam APBD tahun anggaran 2020 dan kembali dicatat pada tahun anggaran 2021.

#### 4.2.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana masyarakat belum mampu memenuhi standar kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ketidakmampuan ditandai dengan rendahnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang dan papan. Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan sejumlah penduduk yang tidak mampu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari persentase penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.



Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

Gambar diatas, menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Secara umum tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu tahun 2012 sebesar 5,47% dan pada tahun 2021 sebesar 4,82%. Namun selama periode sepuluh tahun tersebut terjadi peningkatan kemiskinan yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016.

#### 4.2.6 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh penaksiran yang terbaik. Adapun uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan program *IBM® SPSS® Statistics* (SPSS versi 26).

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Uji normalitas dilakukan dengan uji One-Sample kolmogorov-smirnov dengan kaidah keputusan jika signifikan lebih dari  $\alpha=0,05$  maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal yang terlihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26512311
Most Extreme Differences	Absolute	.233
	Positive	.145
	Negative	-.233
Test Statistic		.233
Asymp. Sig. (2-tailed)		.133 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6, menunjukkan signifikansi pengujian sebesar 0.133 dan nilai tersebut lebih besar dari 0.05 maka nilai residual berdistribusi normal dan data sample variable independent memiliki data yang normal dan valid untuk dilanjutkan uji asumsi klasik selanjutnya.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF (Varian inflation factor)  $<10,00$ ; dan jika tolerance  $>0,100$ . Dari hasil analisis program IBM SPSS versi 26, pada bagian koefisien untuk keempat variabel independen terlihat bahwa nilai tolerance dari variabel rasio kemandirian keuangan(x1) 0,873; Rasio desentralisasi fiskal(x2) 0,799; rasio belanja modal(x3) 0,865; dan rasio belanja transfer ke desa(x4) 0,848. Nilai tolerance keempat

variabel independen dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance bebas multikolinearitas, karena nilai tolerance keenam variabel diatas 0,100.

Nilai VIF rasio kemandirian keuangan(x1) 7.061; Rasio desentralisasi fiskal(x2) 8.733; rasio belanja modal(x3) 6.321; dan rasio belanja transfer ke desa(x4) 5.332. Nilai VIF keempat variabel independen dapat disimpulkan bahwa nilai VIF bebas multikolinearitas, karena nilai VIF keempat variabel dibawah 10.00. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas yang data sample variabel independen tidak terdapat korelasi antar variabel bebas sehingga bisa dilanjutkan untuk uji asumsi klasik selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4. 7 di bawah ini.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	5.199	2.305		2.256	.074			
	x1	-.555	.204	-1.743	-2.713	.042	.142	7.061	
	x2	.602	.187	2.294	3.210	.024	.115	8.733	
	x3	.019	.049	.242	.399	.706	.158	6.321	
	x4	-.018	.078	-.133	-.238	.821	.188	5.332	

a. Dependent Variable: y

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi tujuannya untuk mengetahui pola pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini, maka di susun persamaan regresi berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel rasio kemandirian keuangan(x1), rasio desentralisasi fiskal(x2), rasio belanja modal(x3) dan rasio belanja transfer ke desa(x4) terhadap variabel terikat tingkat

kemiskinan (y). Analisis regresi tersebut menghasilkan koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Adanya autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi berganda yaitu tidak adanya korelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Hasil pengujian metode perhitungan durbin-watson ringkasnya disajikan dalam table 4.5 berikut ini :

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.810 <sup>a</sup>	.656	.381	.24023	1.669

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil analisa IBM SPSS versi 26 pada tabel 4.8 diatas didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.669. dilihat pada tabel Durbin-Watson dengan  $\alpha = 5\%$  diperoleh nilai  $dl=0.376$  dan  $du=2.413$ . Sehingga didapatkan nilai  $dl < dw < du$  atau  $0.376 < 1.669 < 2.413$  kesimpulannya uji korelasi tidak dapat ditarik kesimpulan dan diperlukan uji Runs test. Hasil Runs test ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji Run Test

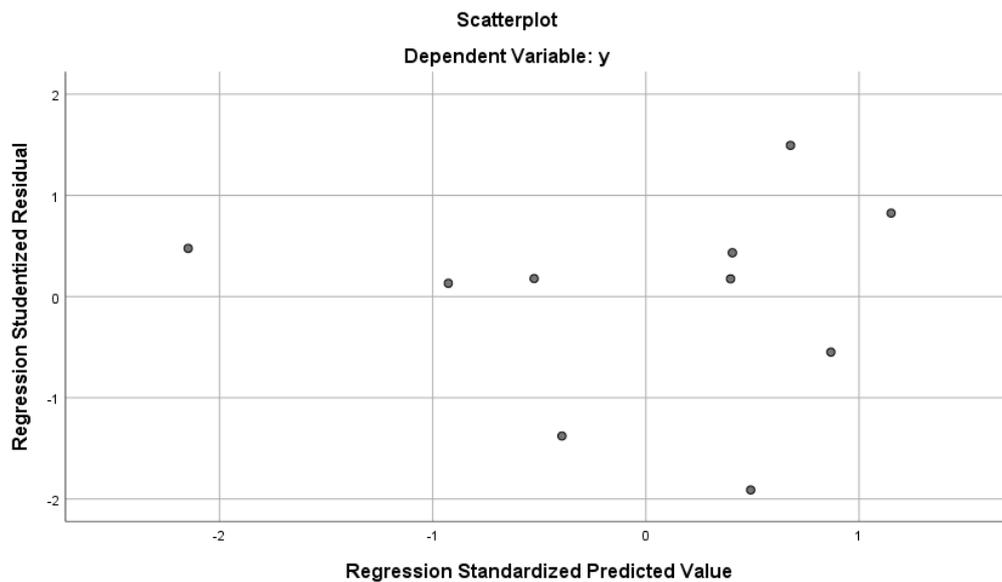
<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.05746
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	6
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 1.000 dan lebih besar dari nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga kesimpulannya data penelitian tidak mengalami gejala korelasi atau tidak ada korelasi antar variabel independent dan uji asumsi klasik dapat dilanjutkan pada uji heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi ada atau tidaknya gejala Heteroskedastisitas yaitu dengan memperhatikan gambar scatterplot hasil uji. Jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 titik y maka tidak terjadi heteroskedastisitas data.



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian yang terlihat pada gambar 4.2 menunjukkan semua variabel bebas menunjukkan tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 titik y, sehingga dapat simpulkan bahwa semua variable bebas tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas atau ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Setelah dilakukan seluruh uji asumsi klasik dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sehingga analisa regresi linier berganda dapat dilakukan karena telah memenuhi persyaratan dan memperoleh penaksiran yang terbaik.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

#### 4.3.1. Rasio Kemandirian Keuangan

- a. Analisa menggunakan nilai signifikan (Sig.)

Penelitian ini memiliki 4(empat) yang diuji untuk melihat pengaruh rasio kemandirian keuangan (x1), rasio desentralisasi fiskal (x2), rasio belanja modal (x3) dan rasio belanja transfer ke desa (x4) terhadap tingkat kemiskinan (y).

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.199	2.305		2.256	.074		
	x1	-.555	.204	-1.743	-2.713	.042	.142	7.061
	x2	.602	.187	2.294	3.210	.024	.115	8.733
	x3	.019	.049	.242	.399	.706	.158	6.321
	x4	-.018	.078	-.133	-.238	.821	.188	5.332

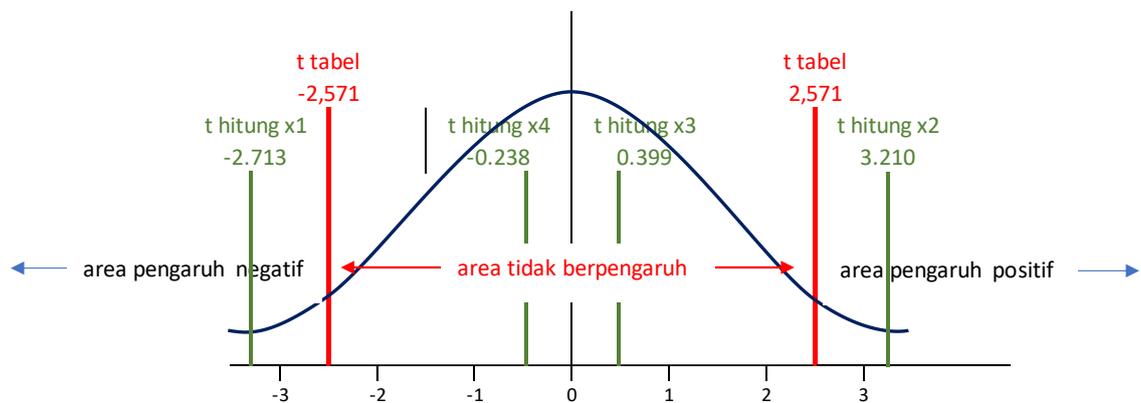
a. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program IBM SPSS v26 seperti terlihat pada Tabel 4.10 di atas, variabel rasio kemandirian keuangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,042. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 ( $\leq 0,05$ ) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,042 < 0,05$ ; maka disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu”, diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Analisa menggunakan nilai t hitung (t)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program IBM SPSS v26 seperti terlihat pada Tabel 4.10 di atas terdapat nilai t hitung yang memiliki nilai minus, sehingga perlu dilakukan analisa lebih lanjut dengan menggunakan kurva. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel maka artinya variable independent(x) secara parsial berpengaruh terhadap variable dependent(y). Rumus mencari tabel adalah  $t \text{ tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 10-4-1) = (0,025; 5)$ . Sehingga di dapat t tabel sebesar = 2,571. Kemudian digambarkan dalam kurva seperti gambar berikut :



Gambar 4.3 Kurva t hitung

Nilai t hitung yang didapat dari program IBM SPSS v26 untuk variabel rasio kemandirian keuangan (x1) adalah -2.713 dan digambarkan dalam kurva t hitung x1 masuk ke area pengaruh negatif. Artinya dapat disimpulkan rasio kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin meningkat rasio

kemandirian keuangan akan sangat berpengaruh negatif (penurunan penduduk miskin) terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hasil analisis korelasi diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan berpengaruh secara signifikan pada penurunan kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu. Nilai signifikansi sebesar 0,042 <0,050 menjelaskan pengaruh terhadap variable tingkat kemiskinan dan diperkuat dengan tabel t hitung di angka -2.713 yang artinya sangat signifikan menurunkan tingkat kemiskinan.

c. Analisa menggunakan persamaan regresi

Setelah dilakukan beberapa pengujian dan analisa sehingga didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu

$\alpha$  = konstanta

b = koefisien regresi

X1 = rasio kemandirian keuangan

X2 = rasio desentralisasi fiskal

X3 = rasio belanja modal

X4 = rasio belanja transfer ke desa

e = error term

ketika dimasukan data hasil pengujian pada tabel 4.10 sehingga persamaan menjadi :

$$Y = 5.199 - 0.555 x_1 + 0.602 x_2 + 0.019 x_3 - 0.018 x_4 + 0,05$$

Sehingga Koefisien  $x_1$  sebesar -0,555 artinya setiap 1% nilai  $x_1$  akan mengurangi nilai  $Y$  sebesar 0,555%. Tingkat kemiskinan akan berkurang 0,555% jika rasio kemandirian keuangan dapat meningkat sebesar 1%.

Langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan yaitu :

#### 1) Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah karena untuk Penerimaan dari PDRD sudah close list, close list, artinya sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan memungut pajak lain di luar pajak tersebut.

#### 2) Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data.

### 3) Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

#### 4.3.2. Rasio Desentralisasi Fiskal

##### a. Analisa menggunakan nilai signifikan (Sig.)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.10 di atas, variabel rasio desentralisasi fiskal memiliki nilai signifikan sebesar 0,024. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,024 < 0,05$ ; maka disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu”, diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu.

##### b. Analisa menggunakan nilai t hitung (t)

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, Nilai t hitung untuk variabel rasio desentralisasi fiskal ( $x_2$ ) adalah 3.210 dan digambarkan dalam kurva t hitung  $x_2$  masuk ke area pengaruh positif. Artinya dapat disimpulkan rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, semakin meningkat rasio kemandirian keuangan akan

sangat berpengaruh positif (kenaikan penduduk miskin) terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

c. Analisa menggunakan persamaan regresi

Berdasarkan persamaan regresi diatas, koefisien  $x_2$  sebesar 0,602 artinya setiap 1% nilai  $x_2$  akan menambah nilai Y sebesar 0,602%. Tingkat kemiskinan akan bertambah 0,602% jika rasio desentralisasi fiskal dapat meningkat sebesar 1%.

Secara teoritis instrumen kebijakan fiskal berupa dana transfer dari pusat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dari sisi penerimaan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka implementasi desentralisasi fiskal serta dapat membiayai infrastruktur, membiayai program perluasan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta membantu mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah maupun dengan pusat. Adanya kebijakan fiskal tersebut dapat mempercepat proses pembangunan dan menyerap tenaga kerja yang memadai sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menekan kemiskinan. Namun dalam kenyataan program yang dirancang untuk percepatan penanggulangan kemiskinan belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, salah satu faktor penyebabnya adalah karena lemahnya koordinasi penyusunan program dan kegiatan yang secara komprehensif dan berkesinambungan antar satuan kerja perangkat daerah untuk fokus pada penurunan tingkat kemiskinan. Kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian Kristianus Hiktaop (2015) bahwa desentralisasi fiskal belum berperan secara maksimal dalam menurunkan kemiskinan pada

kabupaten/kota Propinsi Papua, tetapi Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Jajuk Spurijadi, Shanty ratna Darmayanti, Darto Irwan (2009). Rasio desentralisasi fiskal mempunyai nilai koefisien 0,602 yang berarti bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan, apabila desentralisasi fiskal naik sebesar 1 persen maka kemiskinan akan naik sebesar 0,602%. Adanya pengaruh positif tersebut bahwa pengaruh rasio desentralisasi fiskal untuk saat ini belum berperan secara maksimal dalam menurunkan kemiskinan absolut pada Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **4.3.3. Rasio Belanja Modal**

a. Analisa menggunakan nilai signifikan (Sig.)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.10 di atas, variabel rasio belanja modal memiliki nilai signifikan sebesar 0,706. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,706 > 0,05$ ; maka disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Rasio belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu”, ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Analisa menggunakan nilai t hitung (t)

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, Nilai t hitung untuk variabel rasio belanja modal (x3) adalah 0.399 dan digambarkan dalam kurva t hitung x3 masuk ke area tidak berpengaruh. Artinya dapat disimpulkan rasio

belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu

c. Analisa menggunakan persamaan regresi

Berdasarkan persamaan regresi diatas, koefisien  $x_3$  sebesar 0,019 artinya setiap 1% nilai  $x_3$  akan menambah nilai Y sebesar 0,019%. Tingkat kemiskinan akan bertambah 0,019% jika rasio belanja modal dapat meningkat sebesar 1%.

Nilai signifikansi dan nilai t hitung menjelaskan bahwa rasio belanja modal tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan bahkan meningkatkan tingkat kemiskinan. Hasil ini diperkuat dengan persamaan linier yang mempunyai nilai koefisien 0,019 positif, artinya dengan meningkatnya rasio belanja modal sebesar 1% maka akan menambah kemiskinan sebesar 0,019. Pengaruh tersebut tidak sesuai dengan teori umum signifikan secara statistik menurun. Hal ini disebabkan belanja modal yang sudah dilaksanakan selama ini hanya mementingkan pembangunan infrastruktur yang terlihat fisik dan keberadaannya tetapi belum direncanakan sampai pada kegunaan dari aset yang sudah disediakan untuk membantu menurunkan tingkat kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, program yang ada juga dinilai masih reaktif, berjangka pendek dan parsial.

#### **4.3.4. Rasio Belanja Transfer ke Desa**

a. Analisa menggunakan nilai signifikan (Sig.)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.10 di atas, variabel rasio belanja transfer ke desa memiliki nilai signifikan sebesar 0,821. Hasil

penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,821 > 0,05$ ; maka disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Rasio belanja transfer ke desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu”, ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio belanja transfer ke desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Bumbu

b. Analisa menggunakan nilai t hitung (t)

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, Nilai t hitung untuk variabel rasio belanja transfer ke desa (x4) adalah -0.238 dan digambarkan dalam kurva t hitung x4 masuk ke area tidak berpengaruh. Artinya dapat disimpulkan rasio belanja transfer ke desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

c. Analisa menggunakan persamaan regresi

Berdasarkan persamaan regresi diatas, koefisien x4 sebesar -0,018 artinya setiap 1% nilai x4 akan mengurangi nilai Y sebesar 0,018%. Tingkat kemiskinan akan berkurang 0,018% jika rasio belanja transfer ke desa dapat meningkat sebesar 1%.

Perhitungan nilai signifikansi diatas bahwa rasio belanja transfer ke desa berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan walaupun belum berpengaruh secara signifikan. Dari hasil persamaan linier menjelaskan bahwa dengan naiknya rasio belanja transfer ke desa sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,018%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian dana desa kepada pemerintah desa yang diberikan langsung ke

desa langsung bersentuhan dengan pokok permasalahan kemiskinan tetapi dikarenakan dananya terbatas sesuai batas minimal yang diamanatkan dalam Undang-Undang sehingga belum bisa memberi pengaruh signifikan. Perlu beberapa alternatif yang diberikan seperti memberikan belanja transfer ke desa diatas batas minimal yang diwajibkan atau belanja operasional seperti gaji aparat desa dibedakan dengan alokasi yang ada. Semakin besar alokasi yang diserahkan ke desa, makin besar pula penurunan kemiskinan yang dihasilkan sesuai dengan persamaan tersebut, dikarenakan Penggunaan dana desa dalam hal pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran akses masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan pokok seperti kesehatan dan pendidikan. Dana desa digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh akses dengan mudah. Begitu juga dalam bidang pembinaan masyarakat desa, pemanfaat dana desa telah menysasar pada hal-hal mendasar masyarakat agar terbina kehidupannya melalui kegiatan pembinaan masyarakat seperti penyuluhan hidup sehat, penerapan hunian sehat dan program-program pembinaan lainnya. Pembinaan ini mampu merubah pola pikir dan pola laku masyarakat miskin melalui kegiatan yang dianggarkan dana desa sehingga masyarakat dapat terangkat dari kemiskinan.

Dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat menurunkan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat memberikan akses dan pengembangan potensi desa dan masyarakat sehingga mampu menghasilkan produk maupun karya yang mampu meningkatkan daya dukung desa dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat dapat berkembang kemampuannya dan

mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat memberikan cara untuk terlepas dari kemiskinan.

#### 4.3.5. Pengaruh secara simultan (bersama-sama)

##### a. Analisa menggunakan Uji f (Sig.)

Penelitian ini memiliki 4(empat) yang diuji untuk melihat pengaruh secara simultan rasio kemandirian keuangan (x1), rasio desentralisasi fiskal (x2), rasio belanja modal (x3) dan rasio belanja transfer ke desa (x4) terhadap tingkat kemiskinan (y).

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.564	4	.641	3.028	.128 <sup>b</sup>
	Residual	1.059	5	.212		
	Total	3.623	9			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

Gambar 4.4 Hasil Uji f

Penelitian ini memiliki 4(empat) yang diuji untuk melihat pengaruh secara simultan/bersama-sama rasio kemandirian keuangan (x1), rasio desentralisasi fiskal (x2), rasio belanja modal (x3) dan rasio belanja transfer ke desa (x4) terhadap tingkat kemiskinan (y). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program IBM SPSS v26 seperti terlihat pada Tabel 4.10 di atas, nilai signifikansi tabel anova sebesar  $0.128 > 0.05$  maka variabel independent (x) secara simultan tidak berpengaruh terhadap nilai dependent (y) dan dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio

belanja transfer ke desa secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu. Semakin besar rasio kemandirian keuangan maka tingkat kemiskinan akan semakin turun. Karena dengan kemandirian keuangan yang tinggi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mampu menentukan belanja secara mandiri dan sesuai dengan program kerja yang disusun untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian Alla Asmara dan Stannia Suci(2014) bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap peningkatan kemiskinan.
2. Rasio Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu, kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian Kristianus Hiktaop (2015) bahwa desentralisasi fiskal belum berperan secara maksimal dalam menurunkan kemiskinan pada kabupaten/kota Propinsi Papua, tetapi Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Jajuk Spurijati, Shanty ratna Darmayanti, Darto Irwan (2009), dan dapat disimpulkan bahwa program kegiatan yang dibiayai oleh APBD selama ini belum fokus pada kegiatan yang menunjang penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Rasio belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu. Dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal yang sudah dilakukan selama ini belum bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan di masyarakat. Penyebabnya pelaksanaan belanja modal belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk meningkatkan kesejahteraannya.
4. Rasio belanja transfer ke desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu, namun memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Karena alokasi belanja transfer ke desa termasuk di dalamnya belanja gaji aparatur dan operasional desa sehingga lebih kepada belanja habis pakai saja tanpa ada dampak penurunan kemiskinan di desa dan perlu diatur untuk peningkatan alokasi bagi hasil serta penggunaan dana desa tersebut di fokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
5. Secara simultan keempat variable yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio belanja modal dan rasio belanja transfer ke desa belum berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan berpengaruh kepada tingkat kemiskinan, hal ini perlu ditindak lanjuti dengan

optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

2. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan seperti yang dicantumkan dalam Misi RPJMD, perlu dibuatkan kajian penanggulangan kemiskinan daerah yang berisi program kerja yang komprehensif seluruh SKPD serta sistem informasi data penduduk miskin yang memuat berbagai informasi penting mengenai status penduduk miskin beserta intervensi program/kegiatan yang sudah diterimanya.
3. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya berharap pada APBD Kabupaten Tanah Bumbu tetapi lebih memanfaatkan pengusaha atau perusahaan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengarahkan dana CSR nya bergotong royong membantu mensubsidi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu secara proposional antara jumlah penduduk dengan jumlah perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Asmara, Alla dan Suci, Stannia Cahaya (2014), *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten*, Bogor: Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 6 Nomor 1, Juni 2014
- Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan per Kapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 167.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu. (2022). *Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2021*. Batulicin: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto, 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007*, Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4, No. 3, Desember 2010.
- Candra, A., Riandoko, B., & Saskia, D. Y. (2012). *Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2010*. Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi, 20(2), 55.
- Dores, E., & Jolianis. (2014). *Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi Sumatera Barat*. Journal of Economic and Economic Education, 2(2), 126.
- Endrayani, N. K. E., & Dewi, M. H. U. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 5(1), 63.
- Kesumawati, Nila. 2017. *Pengantar statistika penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2015. *Statistik Non Parametrik, Teori dan Aplikasi dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, C. K., Lubis, I., & Mahalli, K. (2008). *Pembangunan manusia di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, 4(1).
- Hiktaop, Kristianus. 2015. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan di Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua*. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Herrhyanto, Nar dan Gantini, Tuti. 2020. *Analisis data dengan statistika nonparametrik*. Bandung: Yrama Widya.

- Merdekawati, I. P., & Budiantara, I. N. (2013). *Pemodelan Regresi Spline Truncated Multivariabel pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*.
- Mukarramah (2020), *Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Aceh*, Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Nalle, F. W., & Kiha, E. K. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(3), 35.
- Niswati, K. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011*. Jurnal Ekonomi Regional, 9(2), 86.
- Permana, A. Y., & Arianti, F. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004- 2009*. Diponegoro Journal Of Economics, 1(1), 1.
- Prakoso, Jalu Aji; Islami, Fitrah Sari; Sugiharti, Rr Retno (2019), *Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Magelang: Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Volume 4 Nomor 1 2019
- Prawoto, A. T. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana.
- Soesastro. 2005. *Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir*. Kanisius. Yogyakarta
- Suprijati, Jajuk; Damayanti, Shanty Ratna; Irawan, Darto (2019), *Desentralisasi Fiskal Dan Kemiskinan Di Provinsi Papua*, Surabaya : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
- Tanah Bumbu, Kabupaten (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026*.
- Ulum, Ihyaul 2009. *Intellectual Capital konsep dan kajian empiris*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Yustie, Renta. Unggul Hariqbaldi. 2014. *Pengaruh Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*. Tahun Xxi, No. 2014 V 1 April.

### **Online**

- Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, *Tabel Dinamis Presentase Penduduk Miskin Propinsi Kalimantan Selatan*, <https://kalsel.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>
- Kabupaten Tanah Bumbu, *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Postur APBD Seluruh Indonesia*,  
<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

**LAMPIRAN**